DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... .. i
DAFTAR ISI..... . ii

BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU..... . 7
2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA..... 7
2.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program RPJMA Tahun 2017 – 2022..... 8
2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 16
2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 17

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19
3.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 19
3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik..... 19
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan..... 24

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 27
4.1. Program dan Kegiatan..... 27
4.2. Pendanaan..... 34
4.3. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan..... 46

BAB IV : PENUTUP..... 49

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena Renja SKPA merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesbangpol Aceh, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan SKPA yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesbangpol Aceh Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Banda Aceh, Juli 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691120 199103 1 014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mempedomani pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan input yang ada. Diantara input tersebut yang terpenting adalah penyediaan anggaran pelaksanaannya. Penyediaan anggaran dimaksud tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, Renja Badan Kesbangpol Aceh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPA merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
- Renja merupakan acuan SKPA untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019
- Renja SKPA merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh pada tahun 2019 ini yang memasuki tahun ke 1 (pertama) dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Aceh, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPA harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan Renja SKPA meliputi antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPA tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMA.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPA harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil *(outcome),* indikator kinerja keluaran *(output)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

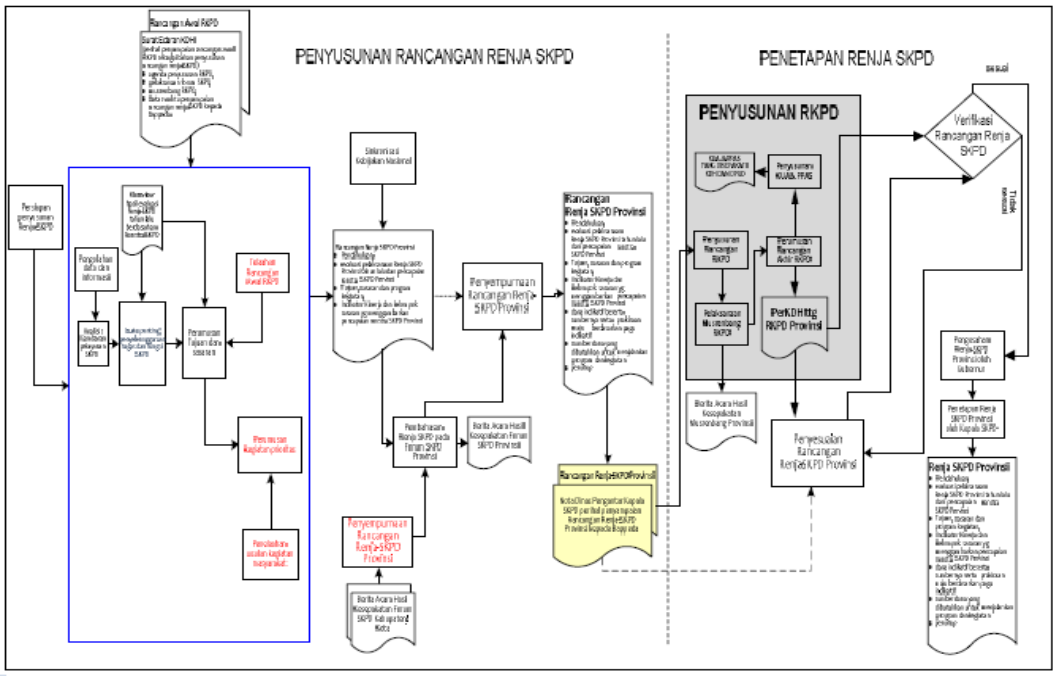

Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh di Tahun 2019 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesbangpol Aceh yakni Keberlanjutan Perdamaian Aceh sebagai pondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan.

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMA 2017-2022. Renja SKPA yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbangpol Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesbangpol Aceh dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga selaras dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Aceh.
2. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Aceh tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menciptakan sinergi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPA TAHUN LALU
CAPAIAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misiagar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengancara membandingkan antara *outputs* dengan *inputs* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *inputs* dengan *outputs*.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Badan Kebangpol Aceh.

Mengingat program dan kegiatan Tahun 2018 sedang berjalan, maka belum ada evaluasi rencana kerja SKPA yang diukur melalui capaian kinerja pada Tahun 2018.

2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada 2017 - 2022, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah sebagai berikut :

1. **Masalah yang bersifat internal**
    a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh baik secara kuantitas maupun kualitas.
    b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
    c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan SKPA lainnya.
2. **Masalah yang bersifat eksternal**
    a. Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten / Kota maupun dengan instansi vertical
    b. Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis e-kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal
    c. Belum optimalnya penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui Fit and Proper Test

2.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMA TAHUN 2017 – 2022

Memperhatikan RPJPA Aceh Tahun 2005- 2025, maka prioritas

pembangunan tahun 2017- 2022 adalah :

1. **Aceh Seujahtra (JKA Plus)**

   JKA Plus merupakan singkatan dari Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi:

   a. Pemenuhan akses layanan kesehatan gratisyang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat;
   b. Pemberian santunan untuk kalangan masyarakat usia lanjut;
   c. Pembangunan Rumah Sakit Regional tanpa menggunakan hutang luar negeri (Loan);
   d. Mengembalikan ruh JKA yang pernah dirasakan oleh rakyat Aceh

2. **Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)**

   SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Sistem ini perlu dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

3. **Aceh Caròng**

   Anak Aceh cerdas (caròng) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas.Program-program yang akan dijalankan untuk tujuan tersebut antara lain:

a. Penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal dan non formal;
b. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pemberian keterampilan bagi peserta didik di dayah-dayah;
c. Pemerataan rasio guru untuk seluruh bidang studi di seluruh penjuru Acehkhususnya daerah terpencil;
d. Peningkatan kompetensi guru dalam bidang studi yang diajarkan secara merata di seluruh Aceh;
e. Penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
f. Pengiriman putra-putri terbaik Aceh untuk mendapatkan pendidikan di universitas-universitas yang bergengsi di tingkat international dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ke depan saat kembali ke Aceh.

4. Aceh Energi

Pemenuhanenergi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan.Agenda-agendastrategis yang akan dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan *Master Plan* Energi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi (validasi data primer dan rencana pengembangan);
b. Penerapan*Public Private Partnership* untuk utilisasi sumber daya energi skala menengah dan besarkhususnya panas bumi dan tenaga air tanpa menggunakan hutang luar negeri;
c. Memastikan komitmen PLN untuk memperbaiki sistem transmisi sehingga tidak sering terjadi pemadaman listrik di Aceh;
d. Percepatan realisasi pembangkit listrik Geothermal Seulawah dan

pembangkit listrik tenaga air (mini dan mikrohidro) dengan kapasitas menengah;

e. Pemberian kemudahan perizinan bagi pihak swasta yang berminat berinvestasi dalam sektor energi bersih dan terbarukan.
f. Memperkuat eksistensi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai perwujudan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA.

5. Aceh Meugoë dan Meulaôt

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi

a. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengaliri seluruh lahan pertanian rakyatdan pencetakan sawah baru;
b. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
c. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;
d. Kemandirian rantai pasok (*supply chain*) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
e. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan

6. Acèh Troë

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri melalui:

a. Peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
b. Penertiban distribusi bibit, pupuk dan obat di bagi pertanian rakyat;
c. Membangun kemandirian pangan melalui penurunan ketergantungan

terhadap provinsi tetangga;

d. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian.

7. Acèh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkanoleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;
c. Merangsanglahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

8. Acèh Kaya

Merangsang tumbuhnya *entrepreneur*yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda;
b. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur;
c. Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda.

9. Acèh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli)akan dijalankan dengan;

a. Pengembangan sistem pengawasandan penilaiankinerja aparatur berbasis e-kinerja
b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan

10. Acèh Damê

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

a. Menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai;
b. Penuntasan aturan turunan UUPA sehingga dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat;
c. Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh;
d. Memasukkan pendidikan damai (peace education) dalam kurikulum sekolah

11. Acèh Meuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislamandalam kehidupan sehari-hari;

a. Penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkatan pendidikan;
b. Melakukan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial;
c. Penguatan eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman;
d. Mendorong sifat ketauladanan yang positif dari pimpinan masyarakat

di setiap tingkatan

12. Acèh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkanprestasi olahragaAcehdi tingkat nasional dan regional;

a. Membangun kerjasama bidang sepak bola dengan klub-klub/pelatih ternama luar negeri untuk membina bibit-bibit pesepak bola dari Aceh
b. Peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan olahraga bagi usia dini
c. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga serta insentif yang mendukung peningkatan prestasi olahragawan;
d. Meningkatkan frekuensi event kompetisi olahraga untuk menjaring bibit-bibit unggul

13. Acèh Green

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutanyang sensitif terhadap resiko bencana alam;

a. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growthplan*)sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
b. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
c. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat
d. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
e. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood

polymer composite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untukpencegahan degradasi hutan

14. Acèh Seuninya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda. Pendekatan program ini dilakukan melalui:

a. Pembangunan rumah gratis untuk masyarakat miskin secara bertahap;
b. Penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu;

15. Acèh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur)secara cerdasdan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulanterutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi;

Adapun Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

1. Visi

"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani"

2. Misi

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakatdengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi;

f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

g. Menyediakan sumber energiyang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;

i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning*yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPK Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPA Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPK Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan

fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1959 sebagai sebuah provinsi paling barat Indonesia terletak diantara Selat Malaka dan Samudera Hindia, sangat strategis baik darui sudut ekonomi, politik maupun geografis, sehingga menjadi jalur perniagaan Internasional yang paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan terobosan dan pembaharuan agar dapat berkembangnya Aceh kedepan.

Agar tidak ketinggalan dari daerah lain, diperlukan pengembangan inovasi dan kreatifitas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayan prima kepada publik perlu ditingkatkan sehingga kehidupan dan kesejahteraan bisa tercapai oleh seluruh masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota Se- Aceh dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom khususnya kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik antara lain adalah :

1. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
2. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu),
3. Penyelesaian perselisihan antara kabupaten/kota,
4. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.

Mengingat Aceh mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

Isu-isu strategis Badan Kesbangpol Aceh tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*

1	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas	Kualitas Birokrasi, Tata Kelola dan Pelayanan Publik masih rendah	
2	Kualitas demokrasi Indonesia masih rendah	Peran Demokrasi Indonesia belum optimal	
3	Masih belum sepenuhnya capaian UUPA terlaksanakan sehingga masih terjadi gesekan yang mengarah instabilitas daerah	Penguatan Perdamaian Secara Berkelanjutan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai, yang meliputi : kebutuhan dasar, keinginan dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diidam-idamkan (visi) menjadi kenyataan.

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

3.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022:

1. Meningkatnya Kualitas Birokrasi, Tata Kelola dan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya peran lembaga demokrasi
3. Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki

3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk mendukung tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Aceh, sasran yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efesien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
4. Terciptanya arus demokrasi yang baik dan akuntabel
5. Meningkatnya Kebebasan sipil Masyarakat
6. Meningkatnya Hak Hak Politik
7. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh

Tabel 3.1 Isu Strategis dan Tujuan

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*	*4*
1	Kualitas Birokrasi, Tata Kelola dan Pelayanan Publik masih rendah	Meningkatkan Kualitas Birokrasi, Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Sistem adminstrasi yang terprogram
			Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
			Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien
			Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
			Meningkatnya elektabilitas OPD

2	Peran Demokrasi Indonesia belum optimal	Meningkatkan peran lembaga demokrasi	Terciptanya arus demokrasi yang baik dan akuntabel
			Meningkatnya Kebebasan sipil Masyarakat
			Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang kondusif
			Mewujudkan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya
			Meningkatnya Hak Hak Politik
3	Penguatan Perdamaian Secara Berkelanjutan	Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh

Tabel 3.2 Penentuan Alternatif Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (*Strength*) :**	**Kelemahan (*Weakness*) :**
	1) Etos kerja pegawai yang cukup tinggi; 2) Adanya peraturan Pemerintah yang menyatakan secara jelas peran/tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	1) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 2) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan; 3) Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; 4) Kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

Peluang (*Oportunity*) : 1) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan dan bidang lainnya; 2) Kesempatan dalam membuat rancangan kegiatan yuang mengarah pada kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;. 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perencanaan pembangunan daerah; 4) Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan "*Good Governance*" dan "C*lean Government*".	1) Etos kerja pegawai menjadi lebih baik; 2) Pelaksanaan tupoksi menjadi lebih optimal dari adanya Peraturan Pemerindah dalam menunjang kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	1) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin; 3) Pemanfaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur semaksimal mungkin; 4) Tersinkronisasinya pelaksanaan program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

Ancaman (*Threats*) : 1) Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama; 2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara; 3) Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah; 4) Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal.	1) Peningkatan dalam penguatan dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara; 3) Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah; 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	1) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas stakeholder dan tokoh masarakat melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pegawai jabatan fungsional

Untuk mengetahui keberhasilan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan diperlukan indikator yang ingin dicapai maka berikut Indikator Sasaran.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya Sistem adminstrasi yang terprogram	Jumlah SDM	
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah bangunan gedung kantor yang tersedia	
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien	Jumlah tindakan Disiplin Pegawai	
4	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat	
5	Meningkatnya elektabilitas OPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan	
6	Terciptanya arus demokrasi yang baik dan	Jumlah SKT yang	

	akuntabel	dikeluarkan	
7	Meningkatnya Kebebasan sipil Masyarakat	Jumlah konflik/tauran antar sekolah	
		Jumlah konflik SARA	
8	Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang kondusif	Jumlah laporan perkembangan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	
9	Mewujudkan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah laporan perkembangan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	
10	Meningkatnya Hak Hak Politik	Jumlah Golput	
11	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh	Jumlah Konflik	
		Jumlah Ancaman yang terdeteksi	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis OPD dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari OPD dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch,p.9,1989).

Strategi dapat juga diartikan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam lima tahun ke depan, Badan Kesbangpol Aceh menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan untuk dapat mensinergikan program pembangunan yang bersinambungan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya Sistem adminstrasi yang terprogram	SDM yang baik dan cukup	Mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Tersedianya penunjang kelengkapan	Menyediakan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
3	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien	Membangun rasa kebersamaan dan kekompakan	Peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
4	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Melakukan inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
5	Meningkatnya elektabilitas OPD	Data dan Informasi yang valid	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
6	Terciptanya arus demokrasi yang baik dan akuntabel	Membangun sistem yang terkoneksi antar instansi	Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tatacara pendaftaran Ormas dengan harapan terciptanya peningkatan kapasitas kepemimpinan yang baik
7	Meningkatnya Kebebasan sipil Masyarakat	Mengembangkan sistem kerjasama antar kelompok kepentingan	Bersama-sama komponen masyarakat dalam rangka terciptanya kaderisasi penguatan nilai sejarah, karakter dan wawasan kebangsaan
		Memberikan edukasi terhadap kebebasan dalam berdemokrasi	Membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap Hak dan Kewajiban dan meningkatkan kesadaran bela Negara
8	Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang kondusif	Memberikan rasa aman dan tentram	Menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan saling gotong royong
9	Mewujudkan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	Mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan harapan terciptanya kehidupan masyarakat majemuk yang bertoleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya
10	Meningkatnya Hak Hak Politik	Memberi rasa aman dan kesejukan	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan politik dalam negeri dengan harapan adanya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan terciptanya etika dan budaya yang baik dalam

			berpolitik
11	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamian aceh	Pendekatan serta memberikan pemahaman	Mencari formulasi dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik sosial tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif
		Membuat pemetaan setiap potensi yang meresahkan	Penyiapan SDM dalam rangka menangkal bentuk radikalisasi yang bisa merusak tatanan hidup dalam bernegara dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal sehingga terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif

Dari penyusunan strategi dan arah kebijakan inilah maka diperlukan langkah-langkah penentuan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Aceh. Sehingga akan terarah dalam rangka mencapai sasaran yang akan ingin dicapai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta visi misi dan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

4.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

   Implementasi Kegiatan berupa :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
   d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   i. Penyediaan Makanan & Minuman.
   j. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah.
   k. Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor.
   l. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
d. Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

Implementasi Kegiatan berupa :

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Implementasi Kegiatan berupa :

- Pendidikan & Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesiapan SDM dalam rangka menangkal bentuk radikalisasi yang bisa merusak tatanan hidup dalam bernegara dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal sehingga terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional
b. Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing
c. Forum Dialog di Daerah Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional
d. Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerja Sama Intelijen Keamanan

7. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap Hak dan Kewajiban dan meningkatkan kesadaran bela Negara

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Pemantapan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
b. Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
c. Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban

8. Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Program ini dilaksanakan untuk bersama-sama komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan

dalam bingkai NKRI dengan harapan terciptanya kaderisasi penguatan nilai sejarah, karakter dan wawasan kebangsaan

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi Pendidik.

9. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tatacara pendaftaran Ormas dengan harapan terciptanya peningkatan kapasitas kepemimpinan yang baik.

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat
b. Pengelolaan Database Ormas dan LNL
c. Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan LNL

10. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan harapan terciptanya kehidupan masyarakat majemuk yang bertoleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Forum Pelestarian Pengembangan dan Pemantapan Seni danBudaya
b. Forum Komunikasi Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
c. Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi

11. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan politik dalam negeri dengan harapan adanya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan terciptanya etika dan budaya yang baik dalam berpolitik.

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik
b. Sosialisasi Regulasi Politik bagi Masyarakat
c. Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik
d. Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal
e. Pendidikan Politik bagi Pengurus Parpol
f. Pengelolaan Database Parpol

12. Program Pembauran Kebangsaan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan saling gotong royong

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
b. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan

13. Program Penanganan Konflik

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mencari formulasi dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik sosial tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif.

Implementasi Kegiatan berupa :

a. Koordinasi Penanganan Konflik
b. Tinjauan capaian Penanganan Konflik Aceh
c. Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh

Tabel 4.1.1 Program dan Indikator Kinerja Program

No	Arah Kebijakan	Program	Indikator
1	*2*	*3*	*4*
1	Mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelengkapan administrasi perkantoran
2	Menyediakan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai.
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
5	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Badan Kesbangpol Aceh
6	Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tatacara pendaftaran Ormas dengan harapan terciptanya peningkatan kapasitas kepemimpinan yang baik	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP
7	Bersama-sama komponen masyarakat dalam rangka terciptanya kaderisasi penguatan nilai sejarah, karakter dan wawasan kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
8	Membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap Hak dan Kewajiban dan meningkatkan kesadaran bela Negara	Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	persentase masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
9	Menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan	Program Pembauran Kebangsaan	jumlah konflik Sara yang tertangani

	saling gotong royong		
10	Mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan harapan terciptanya kehidupan masyarakat majemuk yang bertoleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kasus Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aceh
11	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan politik dalam negeri dengan harapan adanya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan terciptanya etika dan budaya yang baik dalam berpolitik	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada
12	Mencari formulasi dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik sosial tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif	Program Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang tertangani
13	Penyiapan SDM dalam rangka menangkal bentuk radikalisasi yang bisa merusak tatanan hidup dalam bernegara dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal sehingga terciptanya situasi dan kondisi daerah yang kondusif	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini kewaspadaan daerah/nasional yang tertangani

Tabel 4.1.2 Pengukuran Kinerja Program

No	Indikator	Awal	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelengkapan administrasi perkantoran	1 Thn	1 Thn	1 Thn
2	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Thn	1 Thn	1 Thn
3	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai.	1 Thn	1 Thn	1 Thn
4	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	18,52	27,78	32,41
5	Penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Badan Kesbangpol Aceh	58	60	60,6
6	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP	35	25	25
7	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (dari jumlah SMU 481)	NA	10%	20%
8	persentase masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan (rata rata 1.156 yang diikutsertakan)	NA	19,90%	39,79%

9	jumlah konflik Sara yang tertangani	3	3	4
10	Persentase kasus Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (967 kasus) di Aceh	NA	10,34%	20,68%
11	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	73,00%	73,00%	73,01%
12	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	95,54%	96,04%	96,54%
13	Persentase Ancaman/deteksi dini kewaspadaan daerah/nasional yang tertangani	88,24%	89,24%	90,24%

4.2. Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2017 - 2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				RENCANA TAHUN 2019		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	**1**			**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur	Banda Aceh		**8.028.130.952**	APBA		**8.590.630.952**	APBA
5	1	1	1	Gaji dan Tunjangan				4.467.810.952			4.587.810.952	
5	1	2	2	Tunjangan Tambahan Penghasilan				3.560.320.000			4.002.820.000	
5	**2**			**BELANJA LANGSUNG**				**15.219.326.800**			**18.601.310.520**	
5	0	0	1	**PELAYANAN ADM PERKANTORAN**	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Banda Aceh		**3.742.501.600**	APBA		**5.025.656.880**	APBA
5	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya persentase rata rata surat yang tersampaikan		1 tahun	9.000.000		1 Tahun	9.900.000	

5	0	0	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhi kebutuhan informasi, penerangan dan air kantor		1 tahun	454.848.000		1 Tahun	531.205.920	
5	0	0	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor		1 tahun	20.129.000		1 Tahun	21.329.000	
5	0	0	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran		1 tahun	110.695.200		1 Tahun	133.995.200	
5	0	0	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran		1 tahun	67.728.400		1 Tahun	67.728.400	
5	0	0	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran		1 tahun	3.505.000		1 Tahun	5.505.000	
5	0	0	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	-		1 Tahun	737.500.000	

5	0	0	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlayaninya kebutuhan informasi		1 tahun	19.896.000		1 Tahun	17.396.000	
5	0	0	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran		11 bln	114.500.000		11 bln	114.500.000	
5	0	0	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam dan Luar Daerah		1 tahun	809.020.000		1 Tahun	1.203.100.000	
5	0	0	20	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	Tersedianya dokumentasi perkantoran		1 tahun	343.800.000		1 Tahun	368.468.000	
5	0	0	22	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1 tahun	1.789.380.000		1 Tahun	1.815.929.368	
5	0	0	2	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN**	Meningkatnya pelayanan Publik	Banda Aceh		**1.990.441.000**	APBA		**1.527.075.000**	

5	0	0	3	Pembangunan Gedung kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		2 paket	275.190.000		-	-	
5	0	0	5	Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional	Tersedianya kenderaan dinas operasional		1 unit	-		2 unit	680.000.000	
5	0	0	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya operasional kenderaan dinas		1 tahun	335.490.000		11 unit roda 4 dan 3 unit roda 2	366.000.000	
5	0	0	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		1 tahun	108.340.000		1 Tahun	121.700.000	
5	0	0	42	Rehab sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor		2 paket	1.024.681.000		1 paket	100.000.000	
5	0	0	46	Pembinaan kelembagaan	Meningkatnya mekanisme kerja yang efektif dan efesien dalam melaksanakan tugas		1 tahun	246.740.000		1 pelatihan dan 4 kali rapat	259.375.000	
5	0	0	3	**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	Meningkatnya SDM Aparatur	Banda Aceh		**72.550.000**	APBA		**79.805.000**	APBA

5	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Profesionalisme aparatur		200 stel	72.550.000		120 stell	79.805.000	
5	0	0	5	**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	Meningkatnya SDM Aparatur	Banda Aceh		**117.900.000**	APBA		**279.015.000**	APBA
5	0	0	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Profesionalisme aparatur		1 tahun	117.900.000		6 diklat	279.015.000	
5	0	0	6	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	Tercapainya kinerja perkantoran	Banda Aceh		**604.325.000**	APBA		**622.297.000**	APBA
5	0	0	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya data dan informasi kinerja SKPA		1 tahun	546.485.000		10 lap	544.207.000	
5	0	0	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselesainya laporan keuangan akhir tahun		1 tahun	57.840.000		1 lap	78.090.000	
5	0	1	28	**PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN**	Jumlah rekomendasi penguatan kesatuan dan persatuan yang ditindaklanjuti	Aceh		**793.200.000**	APBA		**1.243.200.000**	APBA

5	0	1	1	Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi Pendidik	Meningkatnya Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan bagi Pendidik		2 angkatan	159.460.000		200 peserta	309.460.000	
5	0	1	2	Penyiapan Kader Pembauran Kebangsaan			345 orang	290.840.000		3 keg kab/kota	290.840.000	
5	0	1	3	Penyiapan Kader Bela Negara			200 orang	342.900.000		3 angkatan	642.900.000	
5	0	1	30	**PROGRAM FASILITASI KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Aceh		**905.350.000**	APBA		**1.278.646.000**	APBA
5	0	1	1	Forum Pelestarian Pengembangan dan Pemantapan Seni dan Budaya	Meningkatnya pemahaman terhadap seni dan budaya		300 peserta	179.975.000		3 Kali Keg	270.000.000	
5	0	1	2	Forum Komunikasi Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Terlaksananya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama		500 peserta	481.425.000		7 Angkatan	541.425.000	

5	0	1	3	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	Tersedia data ketahanan ekonomi dalam masyarakat		10 kab/kota	64.250.000		1 Laporan	114.250.000	
5	0	1	4	Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	Terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan		4 kegiatan	179.700.000		5 Angkatan	352.971.000	
5	0	1	31	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK DALAM NEGERI**	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah	Aceh		**2.055.426.000**	APBA		**2.516.850.000**	APBA
5	0	1	1	Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik	Terwujudnya partisipasi masyarakat dan partai politik dalam pembangunan		23 kab/kota	341.992.000		8 FGD/ 200 peserta	330.000.000	
5	0	1	2	Sosialisasi regulasi politik bagi masyarakat	Tersosialisasinya regulasi politik		5 kab/kota	246.599.000		3 Angkatan/ 240 peserta	290.000.000	
5	0	1	3	Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman etika dan budaya dalam berpolitik	Terciptanya etika dan budaya yang baik dalam berpolitik		400 peserta	322.186.000		2 Angkatan/ 200 peserta	356.000.000	

5	0	1	4	Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	Meningkatnya kecakapan dan kemampuan perempuan dan kaum marginal dalam partisipasi politik		300 peserta	229.034.000		4 angkatan	434.000.000	
5	0	1	5	Pendidikan Politik bagi pengurus Parpol	Meningkatnya pemahaman berpolitik bagi pengurus parpol		200 peserta	220.779.000		3 Angkatan/ 240 peserta	315.000.000	
5	0	1	6	Pengelolaan Database Parpol	Tersedianya database parpol		1 dokumen	275.986.000		2 Kali Bimtek/30 kali rapat	283.000.000	
5	0	1	7	Koordinasi dan pemantauan situasi politik	Terlaksananya pemantauan pelaporan dan evaluasi situasi politik		1 dokumen	418.850.000		6 kali rapat	508.850.000	
5	0	1	27	**PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN**	Jumlah konflik SARA yang tertangani	Aceh		**461.837.200**	APBA		**776.279.000**	APBA
5	0	1	1	Pemantapan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman nilai sejarah, karakter dan wasbang		5 kegiatan	190.779.200		2 Kali/200 peserta	290.779.000	

5	0	1	2	Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara		3 kegiatan	117.308.000		80 Orang	228.000.000	
5	0	1	3	Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban	Meningkatnya Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban		50 peserta	153.750.000		2 Angkatan/ 100 orang	257.500.000	
5	0	1	32	**PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN**	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Aceh		**606.965.000**	APBA		**608.945.000**	APBA
5	0	1	1	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Terpetanya data pembauran kebangsaan		1 Kegiatan	189.935.000		5 Kali	189.935.000	
5	0	1	2	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya pembauran kebangsaan bagi masyarakat		7 kegiatan	417.030.000		5 Kali/2 angkatan	419.010.000	
5	0	1	33	**PROGRAM PENANGANAN KONFLIK**	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Aceh		**1.476.562.500**	APBA		**1.882.915.000**	APBA

5	0	1	1	Koordinasi Penanganan Konflik	Tersedianya data persentase penanganan konflik di Aceh		5 dokumen	925.509.500		6 Kali/795 peserta	1.030.000.000	
5	0	1	2	Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh	Tersedianya dokumen hasil capaian penanganan konflik Aceh		4 kali FGD, 1 survey 660 peserta	265.408.000		5 Kali FGD	507.700.000	
5	0	1	3	Konferensi/seminar/lokakarya/ dialog capaian penanganan konflik Aceh	Tersedianya formulasi dan data evaluasi capaian penanganan konflik Aceh		2 akt keg dialog, 1 keg lokakarya hasil survey	285.645.000		4 Kali	345.215.000	
5	0	1	26	**PROGRAM FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL**	Persentase kasus radikalisme dan separatisme	Aceh		**1.554.868.500**	APBA		**1.690.359.000**	APBA
5	0	1	1	Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional	Tersedianya hasil kajian / analisis dan data situasi dan kondisi daerah		1 akt dan 95 peserta	220.009.500		1 Angkatan/ 95 peserta	250.000.000	

5	0	1	2	Koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing	Tersedianya data dan terkoordinasinya kegiatan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing		1 akt dan 95 peserta	190.159.000		1 Angkatan/ 96 peserta	207.158.000	
5	0	1	3	Forum Dialog di Daerah Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional	Terdeteksinya permasalahan di daerah		3 akt 240 peserta	816.750.000		3 Angkatan/ 240 peserta	916.750.000	
5	0	1	4	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	Berkurangnya potensi konflik di Aceh		3 raker dan 1 rakor dan 250 peserta	327.950.000		3 Raker/250 peserta/1 rakor	316.451.000	
5	0	1	29	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Jumlah kegiatan pembinaan Ormas di Daerah	Aceh		**837.400.000**	APBA		**1.069.367.632**	
5	0	1	1	Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat	Tersedianya informasi tentang tatacara pendaftaran ormas		1 laporan	52.290.000		450 Buku	291.677.632	

5	0	1	2	Pengelolaan Database Ormas dan LNL	Tersedianya data ormas		1 dokumen	183.100.000		1 Dokumen	152.068.000	
5	0	1	3	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan LNL	Terciptanya peningkatan kapasitas fungsionaris Ormas dan LNL		4 akt sosialisasi	418.960.000		5 Kali keg/5 kali FGD	405.000.000	
5	0	1	4	Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL	Terjalinnya sinergisitas dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan pemerintah dengan ormas		2 angkatan	138.100.000		5 Kali/225 peserta	150.100.000	
5	0	1	5	Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing	Terciptanya peningkatan kepemimpinan dan kaderisasi Ormas dan LNL		1 angkatan	44.950.000		5 Kali/150 buku	70.522.000	
			Jumlah					**23.247.457.752**			**27.191.941.472**	

4.3. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

PProses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sebagai SKPA yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMA Aceh Tahun 2017 - 2022 melakukan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi SKPA serta dengan memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 - 2018 agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMA dapat tercapai.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka kinerja penyelenggara bidang urasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang mengacu pada RPJMA Aceh Tahun 2017 - 2022 :

4.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Dalam penyusunan IKU maka harus dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Tabel 4.3.1. Indikator Kinerja Utama

No	**Indikator Kinerja Utama**	Tahun		
		Awal	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembinaan Ormas/LSM/OKP - Jumlah Surat Keterangan Terdaftar	35	25	25
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	6	7	7

4.3.2. Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Aceh

Indikator Kinerja pemerintah dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, dan cita-cita, dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa tersalurkan, terpenuhi, dan terpuaskan dengan menggunakan jalur organisasional. Dikatakan sedemikian maksudnya adalah karena adanya hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi dalam arti bahwa manusia tidak mungkin lagi mencapai berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebagainya.

Dalam mengukur tujuan dari pelaksanaan Pemerintah Daerah, Kinerja Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Kesbangpol Aceh

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		Awal	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	18,52	27,78	32,41
2	Penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Badan Kesbangpol Aceh	58	60	60,6
3	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP	35	25	25
4	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (dari jumlah SMU 481)	NA	10%	20%
5	persentase masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan (rata rata 1.156 yang diikutsertakan)	NA	19,90%	39,79%
6	jumlah konflik Sara yang tertangani	3	3	4
7	Persentase kasus Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (967 kasus) di Aceh	NA	10,34%	20,68%
8	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	73,00%	73,00%	73,01%
9	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	95,54%	96,04%	96,54%
10	Persentase Ancaman/deteksi dini kewaspadaan daerah/nasional yang tertangani	88,24%	89,24%	90,24%

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2017-2022 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Aceh serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2019 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBA Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2019, maka perubahan program dan kegiatan diharapkan bersinergi dengan penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPA yang membidangi fungsi lain.

Banda Aceh, Juli 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691120 199103 1 014